



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
KOMISI VII DPR RI  
KE PROVINSI GORONTALO**

**RESES MASA PERSIDANGAN I  
TAHUN SIDANG 2017-2018**

**KOMISI VII  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA  
2017**

# **BAGIAN I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pembangunan di bidang energi masih menghadapi tantangan utama, berupa peningkatan kebutuhan dan konsumsi energi yang tidak diimbangi secara proporsional oleh ketersediaan sumber-sumber energi. Sumberdaya energi merupakan sarana produksi dan sarana kehidupan sehari-hari yang memegang peran penting dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang berkesinambungan, handal, terjangkau dan ramah lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan, baik secara nasional maupun di daerah. Salah satu daerah yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan di bidang energi dan sumber daya mineral adalah Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang relatif baru yang lahir pada tahun 2010 merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara.

Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis energi, baik berupa energi fosil maupun energi terbarukan. Energi fosil dan energi terbarukan yang dimiliki Gorontalo adalah minyak bumi, gas bumi, biomasa (kayu, batok kelapa dan sekam), tenaga air, panas bumi, tenaga surya, dan tenaga angin. Secara keseluruhan Gorontalo mempunyai potensi tenaga air (hidro dan minihidro) yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal, apabila tenaga air tersebut dimanfaatkan melalui PLTA diperkirakan dapat menghasilkan listrik sebesar 166,96 GWh. Lapangan panas bumi di Provinsi Gorontalo tersebar di Lombongo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango (25 MW), Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo (15 MW) dan Mootilango Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dengan total potensi panas bumi lebih dari 40 MW (Perencanaan Energi Provinsi Gorontalo 2000 – 2015) Dari total

tersebut hampir 62% berlokasi di Lombongo Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Selain potensi energi yang dimiliki tersebut, sementara ini Provinsi Gorontalo juga masih menghadapi permasalahan di bidang energi berupa keterbatasan pasokan dan sumber energi, baik dalam penyediaan bahan bakar maupun masalah kelistrikan, padahal provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang sebenarnya mempunyai sumber-sumber energi yang cukup besar. Masalah infrastruktur, pengembangan wilayah dan pemenuhan kebutuhan listrik juga menjadi prioritas bagi pembangunan di Gorontalo. Untuk itu, perlu melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang energi dan pemanfaatan sumber daya mineral agar dapat langsung diketahui tentang masalah yang dihadapi dan alternatif solusi yang bisa dilakukan.

Kebutuhan energi listrik di Provinsi Gorontalo pada umumnya meningkat seiring dengan pertumbuhan daerah, apalagi ini merupakan daerah yang relatif baru yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan dan pengembangan. Dalam percepatan pembangunan diperlukan pasokan sumber energi listrik untuk mencukupi kebutuhan tersebut, termasuk diantaranya dengan pembangunan pembangkit listrik baru. Untuk itu, perlu peninjauan dan melihat langsung perkembangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan kehandalan pasokan listrik.

Selain itu, sebagai provinsi yang sedang berkembang dan giat-giatnya melakukan pembangunan, Provinsi Gorontalo juga perlu memanfaatkan dan mengembangkan riset dan teknologi untuk akselerasi pembangunan. Ristek juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam pengembangannya. Hal penting yang juga harus diperhatikan adalah tentang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

harus menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan dan pengembangan wilayah di Provinsi Gorontalo, agar ke depan tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat salah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lokasi kunjungan pada reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017 – 2018. Kunjungan ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang – bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib beserta Perubahannya.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA**

Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Gorontalo adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya

pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Gorontalo khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi;
3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah.
4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Gorontalo pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan pengembangan energi baru dan terbarukan.

#### **D. LOKASI KUNJUNGAN, WAKTU DAN AGENDA KEGIATAN**

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Gorontalo direncanakan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sd. 1 Nopember 2017. Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pertemuan bersama Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Dinas Energi dan Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek RI, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), dan instansi terkait lainnya.
2. Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero) dan jajaran Pertamina di Gorontalo.

3. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) dan jajaran PLN di Gorontalo.
4. Peninjauan Danau Limboto.
5. Peninjauan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Telaga di Kota Gorontalo.
6. Peninjauan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara.

Jadwal dan agenda kunjungan lebih lengkap *dalam lampiran*.

#### **E. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan)
2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.

#### **F. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN**

Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI, Sekretariat Komisi VII DPR RI, *sebagaimana daftar dalam lampiran*. Selain itu juga didampingi oleh mitra komisi VII DPR RI.

## **BAGIAN II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA**

Pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Gorontalo dilakukan dengan peninjauan langsung ke lapangan dan pertemuan dengan mitra Komisi VII DPR RI, dengan hasil sebagai berikut:

#### **A. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Gorontalo bersama jajaran SKPD, Dinas Energi dan Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek RI, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), dan instansi terkait lainnya.**

1. Provinsi Gorontalo mempunyai potensi mineral yang bernilai ekonomis berupa mineral logam yang terdiri dari emas, tembaga, perak, dan bijih besi. Sedangkan mineral non logam dan batuan terdiri dari batu gamping, marmer, andesit, besalt, dan granit. Pengusahaan pertambangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Kontrak Karya untuk jenis logam terdiri dari 11 IUP eksplorasi dan 3 IUP operasi produksi. Untuk pengusahaan pertambangan IUP jenis batuan terdiri dari 71 IUP operasi produksi. Sedangkan pengusahaan pertambangan dengan Kontrak Karya terdapat 1 KK pada tahap konstruksi dan 1 KK pada tahap studi kelayakan.
2. Pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan dengan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian usaha pertambangan. Selain itu juga pembuatan neraca sumber daya dan cadangan tambang untuk Provinsi Gorontalo. Permasalahan pengelolaan pertambangan di Provinsi Gorontalo berupa adanya penambangan emas tanpa izin (PETI), penambangan galian batuan (Golongan C) yang liar dan tidak dapat dikendalikan, lemahnya sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai kapasitas di

bidang pertambangan, serta masih minimnya fasilitas dan sarana-prasarana untuk menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan pertambangan.

3. Provinsi Gorontalo juga mempunyai potensi energi panas bumi (geothermal) sebesar 110 MW dan 20 MW yang berlokasi di Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango dan Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Selain itu, juga mempunyai potensi energi biomassa yang sudah dikembangkan dalam tahap pembangunan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Biomass (PLTB) dengan kapasitas 12 MW yang berlokasi di Kecamatan Isimu Selatan Kabupaten Gorontalo.
4. Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air yang tersebar di beberapa daerah kabupaten dengan debit air yang beragam, beberapa daerah yang memiliki potensi pembangkit listrik tenaga air sebagai berikut:

No	Daerah	Nama Sungai	Debit Air	Elevasi
1	Kabupaten Gorontalo	Paguyaman Mohiolo	231,27	57
2	Kabupaten Boalemo	Paguyaman Tangkobu	156,8	21
3	Kabupaten Pohuwato	- Randangan	372,71	16
		- Taluditi	30,781	21
5	Kabupaten Bone Bolango	- Alale Lombongo	179,07	33
		- Bolango Boidu	84,355	39
		- Bone Tulabolo	31,706	88
		- Bolango Longalo	15,346	56
6	Kabupaten Gorontalo Utara	Andegile	32,257	10



5. Sedangkan potensi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

No	Jenis Energi	Satuan	Total Cadangan	Pemanfaatan
1	Air Skala Besar	MW	70,5	Belum Dimanfaatkan
2	Minihydro	MW	19,5	4,2 MW
3	Mikrohydro	MW	1,849	430 KW
4	Panas Bumi	MW	110	Belum Dimanfaatkan
5	Energi Angin	KW	50 -400	Belum Dimanfaatkan

6. Di sektor ketenagalistrikan rasio elektrifikasi di Provinsi Gorontalo saat ini sebesar 87,89%, dengan rincian elektrifikasi terbesar di Kota Gorontalo sebesar 98,39% dan paling rendah di Kabupaten Boalemo sebesar 78,40%. Selain itu juga terdapat jumlah desa berlistrik, secara umum jumlah desa berlistrik di Provinsi Gorontalo mempunyai rasio sebesar 98,08% dengan rincian untuk Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwatu, dan Kabupaten Boalemo mencapai 100% dan untuk kabupaten yang lainnya berkisar sebesar 94%-98%.
7. Provinsi Gorontalo berupaya melakukan pengembangan energi baru dan terbarukan serta memaksimalkan potensi energi yang ada di Gorontalo, termasuk mempertimbangkan pengembangan pemanfaatan energi nuklir guna mendukung elektrifikasi.
8. Di sektor lingkungan hidup saat ini yang menjadi perhatian untuk konservasi dan penyelamatan lingkungan adalah Danau Limboto karena kondisi yang sudah degradasi dan mengalami kerusakan cukup parah. Danau Limboto juga sudah merupakan kawasan strategis nasional untuk konservasi, untuk itu Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah mengalokasikan anggaran

untuk program konservasi Danau Limboto namun masih sangat terbatas anggarannya.

**B. Pertemuan dengan Direksi dan jajaran PT Pertamina (Persero) MOR VII, serta peninjauan Depot BBM Gorontalo**

1. Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII membawahi kegiatan operasional Pertamina di seluruh area Sulawesi, termasuk Provinsi Gorontalo. Kegiatan operasional MOR VII meliputi penjualan BBM retail, BBM industri, avtur, LPG, pelumas dan aspal dengan total lembaga penyalur sebanyak lebih dari 900 lembaga penyalur. Dalam menjamin ketahanan supply di Sulawesi, MOR VII memiliki 17 Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), 7 Depot Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara (DPPU) dan 2 Depot LPG. Untuk kabupaten / kota di Provinsi Gorontalo, BBM / BBK disuplai dari TBBM Gorontalo, sedangkan LPG disuplai dari Stasiun Pengisian dan Pengiriman Elpiji Khusus (SPPEK) Gorontalo.
2. Lokasi Depot BBM Gorontalo yang berada di wilayah Kota Gorontalo sudah terkendala lahan dan lokasi yang terletak di wilayah kota Gorontalo. Apabila dilakukan pengembangan depot BBM tersebut akan terkendala masalah lokasi dan lahan, untuk itu perlu direncanakan pemindahan lokasi yang lebih strategis untuk pengembangan Depot BBM dan LPG Gorontalo di lokasi lain yang lebih memungkinkan untuk pengembangan dengan kapasitas lebih besar. PT Pertamina (Persero) perlu segera membuat perencanaan pengembangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk penyiapan lokasi yang diperlukan.
3. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan harga jual BBM dengan satu harga sesuai kebijakan pemerintah, PT Pertamina (Persero) perlu memastikan bahwa BBM yang didistribusikan untuk

masyarakat dengan harga yang sesuai ditentukan oleh pemerintah. PT Pertamina (Persero) menyampaikan bahwa harga jual BBM satu harga hanya bisa dijamin dan dilakukan pengawasan sampai titik penyalur yaitu SPBU. Namun, apabila harga jual eceran yang dilakukan oleh masyarakat sendiri tidak dapat dikendalikan oleh PT Pertamina (Persero).

4. Salah satu upaya agar tidak terjadi harga jual eceran BBM yang ada di masyarakat adalah dengan menghindari adanya penimbunan BBM oleh oknum masyarakat tertentu. Penimbunan bisa dilakukan masyarakat dengan membeli BBM sebanyak-banyaknya di SPBU Pertamina, lalu apabila stok BBM di SPBU habis, maka penimbun akan menjual BBM dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual BBM yang ditentukan. Atas hal ini, PT Pertamina (Persero) telah melakukan antisipasi agar tidak terjadi penimbunan BBM dengan cara menghitung secara cermat kebutuhan BBM masyarakat dan menghindari adanya aksi borong BBM oleh oknum masyarakat tertentu.
5. Distribusi dan pasokan BBM untuk wilayah Gorontalo dilakukan dengan moda transportasi darat dan laut. Untuk transportasi darat mempunyai rentang jarak mencapai 450 km dengan jalan yang berliku dan berbukit serta mempunyai potensi longsor. Sedangkan untuk transportasi laut mempunyai kendala alam berupa pengaruh cuaca dan ketinggian ombak yang mencapai 2 meter. Dari gambaran ini jelas terlihat bahwa distribusi BBM mempunyai potensi kendala dan hambatan berupa transportasi karena faktor alam.
6. PT Pertamina (Persero) mempunyai lembaga penyalur BBM dan LPG di Gorontalo sebagai berikut:

Lembaga Penyalur BBM

No.	Kab/Kota	SPBU Reguler	SPBU Kompak/Mini	SPBUN
1	Kota Gorontalo	8	-	1
2	Gorontalo	7	-	-
3	Boalemo	3	-	1
4	Gorontalo Utara	2	-	2
5	Pohuwato	3	-	-
6	Bone Bolango	1	1	1

Lembaga Penyalur LPG

No.	Kab/Kota	AGEN		SPPBE		SUB PENYALUR	
		PSO	NPSO	PSO	NPSO	PSO	NPSO
1	Kota Gorontalo	2	-	-	-	545	226
2	Gorontalo	3	1	2	-	994	620
3	Boalemo	1	-	-	-	207	26
4	Gorontalo Utara	2	-	-	1	290	115
5	Pohuwato	1	-	-	-	258	28
6	Bone Bolango	1	-	-	-	253	46

**C. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero) dan PLN Wilayah regional Sulawesi, serta Peninjauan PLTD Telaga dan Pembangunan PLTU Anggrek.**

1. Pengusahaan PLN di Provinsi Gorontalo meliputi 6 wilayah kabupaten/kota, dengan rincian Kabupaten Pohuwato rasio elektifikasi sebesar 91,3%, Kabupaten Gorontalo Utara rasio elektifikasi sebesar 97,9%, Kabupaten Bonebolango rasio elektifikasi sebesar 85,5%, Kabupaten Bualemo rasio elektifikasi

sebesar 68,8%, Kabupaten Gorontalo rasio elektifikasi sebesar 89,6%, dan Kota Gorontalo rasio elektifikasi sebesar 100%.

2. Komposisi data pelanggan di Provinsi Gorontalo sebesar 58% merupakan pelanggan pra bayar, sedangkan 42% merupakan pelanggan pasca bayar. Dari sisi subsidi, 64% pelanggan PLN masih merupakan pelanggan subsidi dan 36% merupakan pelanggan non subsidi.
3. Sumber energi untuk pembangkit listrik PLN di Provinsi Gorontalo terdiri dari BBM, air, biomass, surya dan batubara. Energi primer berasal dari BBM sejak tahun 2013 yang paling dominan, namun terus berkurang hingga saat ini tahun 2017 pembangkit dengan BBM tinggal 19,6% dan sisanya sebesar 80,4% merupakan pembangkit non BBM yang diantaranya terbesar adalah bersumber dari batubara.
4. Jumlah pembangkit listrik PLN di Provinsi Gorontalo sebanyak 6 pembangkit dengan kapasitas 189,4 MW. Selain itu juga mempunyai proyek pengembangan sebagai berikut:

Tahap	Pembangkit		Transmisi		Gardu Induk	
	Proyek	MW	Proyek	kms	Proyek	MVA
Potensi	1	7,4	0	0	0	0
Rencana	2	30	3	280	8	210
Committed	1	2	0	0	0	0
Konstruksi	2	150	0	0	3	140
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>189,4</b>	<b>3</b>	<b>280</b>	<b>11</b>	<b>350</b>

5. Program listrik desa di Provinsi Gorontalo juga telah dilaksanakan dengan baik, dari jumlah desa sebanyak 735 desa, sejumlah 712 desa merupakan desa berlistrik dan 23 desa masih belum berlistrik. Dari 23 desa yang belum berlistrik tersebut sebanyak 4 desa dilakukan program listrik desa di tahun 2017 ini, sedangkan sisanya sebanyak 19 desa akan dilaksanakan pada tahun 2018.

6. PT PLN (Persero) di Provinsi Gorontalo mempunyai program CSR berupa program penghijauan sekitar PLTMH Desa Buata, program bantuan fasilitas/peralatan praktek di SMKN 3 Kabupaten Gorontalo, program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo Utara, dan program bantuan computer untuk Yayasan El Madinah Gorontalo.
7. Dalam kunjungan peninjauan ke pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara yang mempunyai kapasitas 2 X 25 MW ditemukan fakta bahwa pelaksanaan pembangunan yang langsung dilakukan oleh PT PLN (Persero) telah mengalami keterlambatan waktu penyelesaian yang cukup lama, telah terjadi manajemen proyek yang kurang baik di PT PLN (Persero) sehingga berdampak “mangkrak” nya proyek PLTU Anggrek. Selain itu juga ditemukan bahwa pelaksana proyek telah tidak melaksanakan kegiatan konstruksi dengan kaidah keteknikan yang baik.
8. Pembangunan PLTU Anggrak ditargetkan akan dapat selesai pada bulan April 2018 untuk Unit I dan pada bulan Juni 2018 untuk Unit II. Selesai pembangunan dan beroperasinya PLTu Anggrek akan sangat mendukung dan mempunyai dampak positif bagi sistem kelistrikan Gorontalo.

#### **D. Peninjauan Danau Limboto**

1. Danau Limboto adalah salah satu aset sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Gorontalo saat ini. Danau Limboto telah berperan sebagai sumber pendapatan bagi nelayan, pencegah banjir, sumber air pengairan dan obyek wisata. Areal danau ini berada pada dua wilayah yaitu + 30 % wilayah Kota Gorontalo dan + 70 % di wilayah Kabupaten Gorontalo dan menjangkau 5 kecamatan. Danau Limboto kini berada pada kondisi yang sangat

memperhatikan karena mengalami proses penyusutan dan pendangkalan akibat sedimentasi yang mengancam keberadaannya dimasa yang akan datang.

2. Semakin berkurangnya luasan perairan danau menyebabkan semakin menurunnya fungsi danau sebagai kawasan penampung air, sehingga berpotensi terjadinya banjir dan kekeringan di sekitar wilayah kawasan danau bahkan di luar kawasan Danau Limboto.
3. Danau Limboto adalah kawasan yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan daya dukung lingkungan hidup. Potensi sosial budaya, ekonomi dan lingkungan dari Danau Limboto diantaranya adalah sebagai gudang plasma nutfah, sebagai reservoir alami limpasan air hujan, merupakan sumber air yang dapat dimanfaatkan berbagai kegiatan, penyedia komoditas hayati ekonomis penting perikanan, habitat burung-burung migrant dan endemik, sebagai sarana transportasi, sebagai sumber energi terbarukan, pelarut bahan pencemar, sebagai kawasan (eco) wisata, dan sumber penghidupan masyarakat terutama petani dan nelayan.
4. Kondisi Danau Limboto terjadi degradasi lahan yang sangat kritis yang menyebabkan pendangkalan Danau Limboto ( 5 juta m<sup>3</sup>/th) laju erosi 9,9 jt ton/th (JICA ) dan perhitungan tahun 2010 adalah 10.5 jt ton/th (IPB). Intensitas genangan, sedimentasi dan banjir di Danau Limboto yang semakin parah (1932 - 30 m Luas 7000 ha, 1961 -16 m luas 4.250 ha,th 2008 2,5 m luas 3,000 ha) diperkirakan pada tahun 2025 menjadi dataran banjir.
5. Dari hasil analisis telah terjadi penurunan lahan kritis tahun 2009 sebesar 20.826 menjadi 15.331 pada tahun 2013, begitu juga dengan lahan tidak kritis meningkat dari 2.950 menjadi 10.391 ini terjadi banyak terjadi di luar kawasan hutan, artinya

terjadi peningkatan lahan tidak kritis karena adanya kegiatan KBR dan penghijauan. Namun lahan sangat kritis bertambah dari 12.375 Ha menjadi 23.871 Ha, hal ini terjadi karena adanya penurunan lahan potensial kritis dari 8.018 menjadi 3.879 Ha dan hal ini terjadi adanya pergeseran fungsi pada kawasan hutan yang menjadi areal lahan pertanian.

6. Isu strategis Danau Limboto yang perlu mendapatkan perhatian segera adalah:

- a. Sedimentasi ( 5 juta m<sup>3</sup>/th) laju erosi 9,9 jt ton/th (JICA ) dan perhitungan th 2010 adalah 10.5 jt ton/th (IPB), Kedalaman berkurang, dari sebelumnya 30 m menjadi 2,5 m. Luas berkurang, 7000 ha menjadi hanya 3000 ha
- b. Frekuensi banjir di sekitar danau meningkat karena penurunan kapasitas tampung danau diperkirakan tahun 2025 menjadi dataran banjir.
- c. Okupasi lahan di sekitar danau tahun 1996 dikeluarkan sertifikat sebanyak 1.341 dan diserahkan simbolis hanya 20 bidang.
- d. Pertumbuhan ekstensif enceng gondok oleh eutrofikasi 85% ditumbuhi oleh eceng gondok dan tumbuhan lainnya.
- e. Budidaya karamba jaring apung (sebanyak 1.250 dengan luas ± 300 Ha).
- f. Adanya lahan kritis, terdapat 12 sub DAS yang bermuara ke danau Limboto dengan 1 outlet, gegradasi lahan yang sangat kritis yang menyebabkan pendangkalan Danau Limboto. DAS Limboto juga di dimonasi oleh kelerangan agak curam (15 -25 %), curam (25 – 40 %) dan sangat curam (> 40 %) seluas 44.799 Ha (50,11 %). sehingga mempercepat erosi.



7. Danau Limboto yang telah mengalami kerusakan cukup parah harus ditangani dengan program yang sistematis dan berkesinambungan serta melibatkan multi sektor. Upaya penyelamatan Danau Limboto telah menjadi program Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Pusat, namun penyediaan alokasi anggaran belum maksimal. Untuk itu perlu penyediaan alokasi dana yang cukup guna upaya konservasi Danau Limboto.

#### **E. Pertemuan dengan Bupati Gorontalo Utara**

1. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai kondisi kelistrikan dengan total kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik sekitar 78 MW yang terdiri dari pembangkit PLN sekitar 55 MW dan IPP sekitar 23 MW. Adapun berdasarkan jenisnya, kapasitas terpasang pembangkit tersebut terdiri dari PLTU batubara sekitar 21 MW, PLTD sekitar 54 MW, dan PLTM sekitar 4 MW.
2. Kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Gorontalo Utara diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sekitar 14.9 % pertahun dalam periode 10 tahun ke depan, atau sekitar 11.6 % pertahun untuk periode 20 tahun ke depan, maka dalam periode 10 tahun ke depan diperlukan tambahan kapasitas rata-rata sekitar 41 MW pertahun, untuk periode 20 tahun rata-rata sekitar 50 MW pertahun. Dengan penambahan kapasitas tersebut, pasokan tenaga listrik di Provinsi Gorontalo akan meningkat dari sekitar 135 MW pada tahun 2015 menjadi sekitar 464 MW pada tahun 2024 dan 1,045 MW pada tahun 2034
3. Berdasarkan dokumen RUPTL Tahun 2013-2022 Perusahaan Listrik Negara(PLN) bahwa di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat dua pembangkit listrik yang akan di kembangkan yakni PLTU Anggrek

2x25 yang saat ini dalam tahapan pengerjaan konstruksi dan Pembangunan Subagut 1 tahun 2019/2020.

4. Terdapat program listrik gratis di Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 telah mencapai 2.475 KK dari target yang ditentukan dalam RPJMD sebanyak 3.475 KK.

## **BAGIAN III**

### **KESIMPULAN, REKOMENDASI DAN PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dari hasil kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Gorontalo, terdapat kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Provinsi Gorontalo mempunyai sumber energi baru dan terbarukan yang cukup besar dan beragam, untuk itu perlu dikembangkan dengan lebih maksimal. Komisi VII DPR RI perlu melakukan rapat dengar pendapat bersama Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM untuk pembahasan pengembangan energi baru dan terbarukan di Provinsi Gorontalo dan wilayah Indonesia bagian timur secara umum.
2. Distribusi dan penyediaan BBM dan LPG untuk masyarakat oleh PT Pertamina (Persero) telah berjalan relatif cukup baik, namun perlu dilakukan upaya untuk menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses BBM dengan harga jual sesuai yang ditentukan oleh pemerintah sebagaimana program BBM satu harga. Untuk itu, Komisi VII DPR RI perlu rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) membahas pelaksanaan kebijakan harga jual BBM satu harga.
3. Kawasan Danau Limboto telah mengalami degradasi dan kerusakan yang sangat parah, untuk itu perlu dilakukan upaya yang terpadu dan sistematis untuk penyelamatannya. Komisi VII DPR RI perlu melakukan rapat kerja bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk membahas upaya penyelamatan danau-danau kritis di Indonesia.

4. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara oleh PT PLN (Persero) telah mengalami keterlambatan waktu penyelesaian yang cukup lama, telah terjadi manajemen proyek yang kurang baik di PT PLN (Persero) sehingga berdampak “mangkrak” nya proyek PLTU Anggrek. Komisi VII DPR RI perlu melakukan rapat dengar pendapat bersama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Direktur Utama PT PLN (Persero) untuk membahas percepatan realisasi proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik.

## **B. PENUTUP**

Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Gorontalo sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jakarta, Nopember 2017

**Pimpinan Delegasi  
Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI**

**Satya W. Yudha**